

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DP3AP2 Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik ;
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1) Tingginya korban kekerasan pada anak;
 - 2) Tingginya kasus kekerasan perempuan;
 - 3) Belum optimal pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - 4) Masih kurangnya peran forum anak;
 - 5) Belum optimalnya kelembagaan PUG;
 - 6) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota;
 - 7) Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
 - 8) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan;
 - 9) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;
 - 10) Belum semua PD melaksanakan PPRG;
 - 11) Belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak;
 - 12) Belum optimalnya Program PATBM;
 - 13) Tingginya pekerja anak;
 - 14) belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan;
 - 15) belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan;
 - 16) Belum optimalnya perempuan sebagai petugas profesional;
 - 17) Ditemukannya TPPO;
 - 18) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislative.
- c. Permasalahan terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- 1) Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jambi;
- 2) Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa;
- 3) Masih sedikitnya jumlah desa mandiri di Provinsi Jambi;
- 4) Masih banyak aparatur desa yang belum memahami pengelolaan administrasi desa dan ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik;
- 5) Masih sedikitnya desa yang mendirikan BUMDesa;
- 6) Kurangnya pengetahuan tenaga pendamping desa;
- 7) Belum optimalnya TTG;
- 8) Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik) ;
- 9) Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemberdayaan desa dan Masih sedikitnya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat;
- 10) Ditemukannya desa yang belum menerapkan SPM .

d. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk Jambi diatas rata-rata nasional;
- 2) Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmetneed*);
- 3) Tingginya angka Pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga;
- 4) Persentase laki-laki ber-KB belum sesuai dengan angka harapan atau target nasional;
- 5) Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
- 6) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM nasional dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi;
- 7) Angka penderita penyakit IMS/HIV/AIDS masih tinggi dan belum terdeteksi;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah ***“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera” JAMBI TUNTAS 2021***. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan⁶ (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,

- meningkatkan kuantitas aparaturnya pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis;
 3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif;
 4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 301 produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan;
 5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah;
 6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke dua dan misi ke enam. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah, sebagai berikut:

Misi ke 2 (dua) dengan Tujuan, sebagai Meningkatkan kualitas SDM Perempuan dengan sasaran strategis Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan, dan Misi ke 6 (enam) dengan Tujuan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah

penduduk dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Povinsi Jambi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender; - Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender belum tinggi; 2. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan cenderung meningkat; 3. Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jamb; 4. Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa; 5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk; 6. Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmetneed)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk melaksanakan penganggaran yang responsig gender • Pemanfaatan anggaran yang tersedia • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A dan personil untuk melayani korban kekerasan • Adanya komitmen kepala daerah untuk
2	Tujuan: - Meningkatkan kualitas SDM Perempuan; - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat			
3	Sasaran: - Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan; - Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	sosial, ekonomi dan budaya		<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di beberapa desa • Masih minimnya pelatihan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencanan pembangunan desa; • Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan penting ber-KB 	<p>mengembangkan Kota Layak Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama antar pemerintahan daerah dalam peningkatan sarana dan prasarana • Telah tersedianya tenaga pelatih dalam proses pengelolaan keuangan desa dan penyusunan rencana pembangunan desa. • Terbentuknya desa kampung KB

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jambi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian PPPA

a. Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan
dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan
komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan
korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus
yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Perempuan
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	daerah dan instansi terkait
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Telaah Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui tujuan ke satu, dua dan tiga, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini yaitu Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan;

3. Meningkatkan percepatan pembangunan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju.

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten dengan target outcome sebagai berikut:

- 1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen;
- 2) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 3) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,594] Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau negatif < 1) sebanyak 80 kabupaten.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa Tertinggal, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah	Masih banyaknya jumlah desa tertinggal di Provinsi Jambi	Hubungan dengan masyarakat luar masih Kurangnya mengakibatkan	Kurangnya pengetahuan dan infrastruktur yang todak memadai

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa		n kurangnnya informasi	
2.	Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antar desa dan kota melalui kawasan perdesaan	Masih Kuranya pembangunan keterkaitan ekonomi sntar desa dan kota melalui kawasan perdesaa n	Lokasi kurang strategis sehingga daya tarik investasi rendah	Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat.
3.	pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten	Masih kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan desa	Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat	Masih tinnginya rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka.

c. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui tujuan keenam yaitu Peningkatan

Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Dalam Negeri melalui sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri;
3. Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;	Kurangnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik	Rendahnya kualitas SDM	Menguatnya tuntutan dalam penyelenggaraan GG
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan kementerian dalam negeri;	Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik dan adanya desa yang belum menerapkan SPM	Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Menguatnya dukungan peningkatan kapasitas
3.	Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.	Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi (pelayanan publik)	Keterbatasan anggaran	Meningkatnya kebutuhan akan informasi yang transparan dan akuntabel

d. Telaah Renstra Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019. Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda

Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, yaitu :

1) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

- 2) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
- 3) Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia sehat
- 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan program Indonesia Kerja

Terkait dengan upaya pencapaian visi nasional, BKKBN memiliki visi untuk menjadi **Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas**”. Untuk pencapaian visi tersebut dijabarkan misi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten;
5. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN dalam rangka mendukung visi nasional adalah:

1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).

Tabel 3.4
Indikator Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

No	INDIKATOR	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,49 (2000-2010)	1,38 (2010-2015)	1,27	1,25	1,23	1,21
2	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,6	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
3	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	61,9 (all method, SDKI 2012)	65,2 (all method)	65,4 (all method)	65,6 (all method)	65,8 (all method)	66,0 (all method)
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91
5	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	48 per 1000 kelahiran	46 per 1000 kelahiran	44 per 1000 kelahiran	42 per 1000 kelahiran	40 per 1000 kelahiran	38 per 1000 kelahiran
6	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	7,1	7,1	7,0	6,9	6,8	6,6

Sumber: Renstra BKKBN Tahun 2014-2019

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB	Pengetahuan orangtua tentang pentingnya pernikahan yang sesuai usia dianjurkan (di atas 20 th)	<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi perangkat daerah Provinsi Jambi baru terbentuk pada akhir tahun 2016 - Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia, Perkawinan (PUP) melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja
2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49 tahun)	Masih rendahnya sosialisasi ttg KB pada WUS	Kurangnya pengetahuan remaja/WUS kurangnya pendidikan kesehatan	Kepedulian masyarakat terhadap Kebutuhan berKB masih tinggi pernikahan diusia dibawah 20 tahun

Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		reproduksi	
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Organisasi atau instansi terkait peduli terhadap KB
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmetneed)	Belum adanya data yang memadai ttg unmet need	Organisasi/perangkat daerah baru terbentuk tahun 2016
5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga	Pemahaman tentang ketakutan orangtua terhadap anak diatas 20 tahun akan jauh jodoh	Adat istiadat, kebiasaan pada masyarakat tersebut
6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15 – 49 tahun).	Kurangnya pengetahuan tentang pemahaman seks dalam kehidupan sehari-hari	Pendidikan tentang pemahaman seks pada remaja masih minim	Peningkatan Norma-norma agama dalam masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tidak bersinggungan dengan Rencana struktur tata ruang dan Rencana pola ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi tidak bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan

bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	20
2	Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota	20
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan	15
4	Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	15
5	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	30
Total		100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rang-king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	1
2	Belum optimalnya perlindungan, sarana dan	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	2

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	pemenuhan hak anak di kab/kota												
3	Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	3
4	Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	4
5	Tingginya laju pertumbuhan penduduk	5	100	5	100	5	75	3	45	4	120	440	5
6	Belum optimalnya Program PATBM	4	80	5	100	5	75	3	45	4	120	420	
7	Ditemukannya desa yang belum melakukan administrasi secara baik	4	80	4	80	5	75	3	45	4	120	400	

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perlindungan, kelembagaan, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Belum optimalnya perlindungan, sarana dan pemenuhan hak anak di kab/kota;
3. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan;
4. Belum optimalnya penguatan ekonomi masyarakat dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
5. Tingginya laju pertumbuhan penduduk.